

DIANTARA BAYANG-BAYANG EKSPLOITASI PERKEBUNAN DAN INVOLUSI PERTANIAN : KEHIDUPAN PETANI DI BOGOR 1905-1960AN

Saring, Januar Barkah, Huddy Husin

Universitas Indraprasta PGRI
Program Studi Pendidikan Sejarah
Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan
saringgintung@gmail.com; januar_link@yahoo.com; hudi0212@gmail.com

Abstrak

Perubahan sistem ekonomi feodal menuju sistem ekonomi kapitalis-kolonial pada masa penguasaan kolonial Belanda di Bogor, telah membuat masyarakat di Bogor khususnya kelompok petani dalam ketidakpastian dalam mempertahankan hidupnya. Ekonomi perkebunan disatu sisi, dan disisi lain ekonomi feodal yang masih dijaga oleh elite-elite lokal pedesaan di Bogor, telah mengikat petani untuk selalu berhadapan dengan beban kerja dan kewajiban-kewajiban tambahan. Pada masa penguasaan imperium militer Jepang, ternyata melebihi pada masa kolonial Belanda, khususnya dalam aspek eksploitasi sosial dan ekonomi. Harapan diawal-awal kemerdekaan sejatinya yang sempat meninggi, hilang manakala kekosongan pemerintahan di Jawa Barat, akibat peristiwa Agresi Militer Belanda I dan II. Kekosongan penguasa ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok anti Republik, dimana wilayah Jawa Barat, hingga hampir seluruh wilayah Bogor dikuasai oleh gerakan DI/TII pimpinan Kartosoewiryo. Konflik antara partai dengan partai maupun partai dengan kelompok militer menjadi semacam fenomena yang mengisi hari-hari kelompok petani dalam usaha mempertahankan hidupnya dalam periode tahun 1960-an

Kata Kunci : Petani; Bogor.

PENDAHULUAN

Penelitian ini memulai langkah awalnya melalui pengamatan terhadap gejala dan fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia kontemporer. Belumlah hilang benar dari ingatan masyarakat kita terhadap beberapa konflik-konflik sosial, bencana alam, dan lain sebagainya. Keseluruhannya muncul bak gayung bersambut, saling susul-menyusul untuk hadir dan diberikan perhatian ditengah-tengah kita. Sebagai contoh diantaranya ialah konflik sosial di wilayah Sumatera yang berhubungan dengan penguasaan dan pengelolaan tanah. Gesekan antara petani dengan industri perkebunan yang terjadi di Ogan Ilir (Palembang) dan di Kampar (Riau) pada 17 dan 28 Juli 2012 yang berakhir dengan jatuhnya korban jiwa, serta kerugian fisik dan materil yang cukup besar (<http://fokus.news.viva.co.id>). Contoh lainnya ialah ketika masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, masyarakat yang berada di pulau Jawa, dikejutkan oleh bencana longsor yang terjadi di wilayah Jawa Tengah. Bencana alam yang terjadi pada 13 Desember 2014 tersebut merenggut cukup banyak korban jiwa, serta kerugian materil yang juga cukup besar pula (<http://lipsus.kompas.com>).

Beberapa kasus lain yang masih dapat disebutkan satu persatu diantaranya ialah perihal penolakan masyarakat petani terhadap pembangunan sarana transportasi udara di wilayah Nusa Tenggara Barat (Bima) dan di wilayah D.I. Yogyakarta (www.metrotvnews.com). Kerusakan lingkungan alam (ekosistem) yang terjadi di wilayah Kalimantan serta Bima (<http://www.phylopop.com>), akibat aktivitas penambangan yang tidak terkontrol. Kasus-kasus yang muncul dipermukaan mungkin tidak akan cukup jika harus diinventarisir dalam latar belakang proposal ini, dikarenakan

jumlah (kuantitas) serta analisis faktor-faktor yang menyebabkannya. Mungkin masih terlalu dini jika dikatakan atau dinilai bahwa beberapa kasus tersebut berhubungan dengan konflik pertanahan ansih, akan tetapi dari keseluruhan kasus tersebut tidak dapat dipungkiri terdapat benang merah yang cukup signifikan dimana terdapat pengaruh yang cukup besar antara munculnya fenomena-fenomena kasus diatas dengan perubahan perilaku sosial, sebagai akibat perubahan pola dalam usaha produksi masyarakat.

Perubahan pola dan mode produksi yang dimaksud adalah perubahan cara berproduksi masyarakat Indonesia, dari sebelumnya bercirikan substensi (hanya memenuhi kebutuhan hidup semata), menuju mode produksi yang diorientasikan memenuhi kebutuhan secara massal (industrialisasi)¹. Transisi perubahan model berproduksi dari substensi menuju industrialisasi ini, sejatinya terjadi ketika pada abad ke-19 sejak masa awal pemerintahan kolonial berkuasa di Nusantara. Semenjak dikenalkannya jenis tanaman komoditi yang bersifat komersil, dikenalkan pula sistem monetisasi, serta penggunaan teknologi yang cukup maju dalam memproduksi tanaman-tanaman maupun komoditi ekspor². Guna mendukung proses industrialisasi tersebut, pemerintah kolonial melakukan penelitian dan pengujian terhadap jenis-jenis tanaman komersil yang akan dihasilkan, di beberapa wilayah di Nusantara (seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan). Setelah dinilai cukup mampu dan dapat ditanam di wilayah-wilayah tersebut, maka pemerintah kolonial membangun infrastruktur di wilayah-wilayah tersebut dalam bentuk sarana-prasana angkutan umum, kantor-kantor dagang, gudang, jalan raya³, serta turut pula menyusun suprastruktur berupa birokrasi pemerintahan lokal yang

menjadi pelaksana dalam menjaga dan mengawasi aktivitas industrialisasi⁴.

Fenomena mengenai perubahan mode produksi, pergantian jenis tanaman, pembangunan sarana-prasarana untuk aktivitas ekonomi dan penyusunan birokrasi lokal inilah yang sekiranya ditetapkan atau dinilai oleh tim peneliti sebagai satu gejala perubahan sosial yang terjadi di Nusantara pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Perubahan sosial serta berbagai perkembangan dan dampaknya, secara kasat mata dapat dirasakan pada wilayah-wilayah *centra* industri seperti di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, akan tetapi dari dua wilayah tersebut Pulau Jawa menjadi wilayah yang sangat masif menerima perkembangan dan dampak dari perubahan yang mendasar tersebut. Sudah cukup banyak studi yang dilakukan oleh para sarjana-sarjana ilmu sosial dan sejarah yang membuktikan bahwa terdapat kesatuan yang utuh dan cukup terikat antara Ekologi, tenaga produktif, teknologi dan sistem pasar, dimana keseluruhannya menjadi modal penting bagi terciptanya daya dan dorongan menuju perubahan sosial.

Satu hal yang harus di garis bawahi adalah, meskipun terjadi perubahan-perubahan yang cukup mendasar dalam fenomena perubahan sosial yang terjadi di secara umum di seluruh wilayah tanah Jawa, akan tetapi tidak dapat pula dilepaskan bahwa perubahan secara medasar (modernisasi dalam aspek sosial dan ekonomi) tersebut, tetap mengikuti dan tunduk pada dimensi keunikan, dan karakteristik lokalitas dari daerah masing-masing. Perbedaan yang cukup signifikan ialah antara perubahan sosial yang terjadi di Jawa bagian barat (sepanjang wilayah Priangan) dengan daerah Jawa bagian tengah (sepanjang wilayah-wilayah kekuasaan *Vorstenlanden*). Pada wilayah Jawa bagian tengah dimana kekuasaan tradisional masih berdiri tegak, jalannya perubahan-perubahan dalam aspek sosial dan ekonomi, mengikuti kontur dari

karakteristik pola penguasaan tanah dan sumber daya manusia di wilayah tersebut. Hal ini cukup berbeda sekali dengan yang terjadi di sepanjang wilayah Jawa bagian barat (wilayah Priangan), dimana kekuasaan lembaga politik tradisional sudah perlahan menghilang (mungkin juga dapat dikatakan sudah menghilang).

Menghilangnya peran lembaga politik tradisional di sepanjang wilayah Priangan (Jawa bagian barat), memberikan bentuk masyarakat yang cukup unik dan berbeda dengan masyarakat di wilayah *Vorstenlanden* dan sekitarnya. Ketiadaan lembaga politik tradisional (dalam wujud Kerajaan dan Kesultanan) yang cukup kuat di sepanjang wilayah Priangan memunculkan bentuk masyarakat yang *egaliter* (sama sederajat), maka dari itu memberikan konsekuensi berupa pemilikan alat produksi (berupa tanah) yang secara otomatis dimiliki secara langsung oleh masing-masing penduduk. Ketiadaan lembaga politik tradisional pula yang meniadakan sistem upeti dari masyarakat kepada Kerajaan, dengan begitu tidak diperlukannya jumlah masyarakat (demografi) yang cukup banyak untuk menghasilkan upeti bagi keluarga Kerajaan.

Sebagai upaya untuk memahami lebih lanjut, dengan meminjam kacamata atau sudut pandang mengenai subordinat, maka dapatlah dipahami bahwa sejak awal abad ke-19, hingga berakhirnya pemerintahan kolonial tahun 1942, hampir seluruh wilayah Priangan berada dalam penguasaan secara langsung oleh pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Point mengenai penguasaan secara langsung ini pula yang menjadi bahasan yang dinilai cukup menarik, karena akan memberikan pandangan serta penjelasan yang cukup berbeda pula dengan daerah-daerah lain seperti *Vorstenlanden* di Jawa Tengah, wilayah Kerajaan Makassar, wilayah

Kesultanan Aceh dan wilayah Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara)⁶.

Adalah wilayah Cipanas-Bogor sebagai salah satu mata rantai paling ujung dibagian barat dari daerah Priangan yang terkena dampak langsung dari perubahan-perubahan secara mendasar dalam aspek sosial-ekonomi. Selain karena letaknya yang dekat dengan Batavia (pusat pemerintahan kolonial), sebagai pusat penelitian dan pengkajian tanaman komoditi perdagangan masa kolonial (dalam bentuk lab biologi kebun raya Bogor), dan salah satu sentra industri perkebunan Teh di wilayah Jawa bagian barat pada era kolonial. Sebagai wilayah yang berada didaerah pedalaman (hinterland), dan memiliki konstruk geografis yang cukup baik untuk ditanami tanaman komoditi perdagangan, di wilayah Bogor sempat berdiri industri semacam teh, karet dan kelapa sawit⁷.

Cukup menarik jika melihat bagaimana keberadaan dari industri-industri perkebunan yang beroperasi diwilayah Bogor-Jawa Barat, karena selain hidup secara berdampingan dengan ekonomi agraris petani lokal, perkebunan tersebut juga menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat kota Bogor. Geliat ekonomi perkebunan disatu sisi dan ekonomi petani di sisi yang berbeda merupakan sebuah fenomena historis, karena hal ini berlaku secara umum dan berlangsung sejak paruh pertama abad ke-20, hingga Indonesia merdeka⁸. Pembangunan industri perkebunan di wilayah Bogor, secara berturut-turut adalah sebagai berikut : Industri perkebunan teh di Bogor pertama kali dibangun pada akhir abad ke-17, setelah uji coba yang dilakukan disekitar rumah peristirahatan Gubernur Jendral berhasil, kemudian perkebunan teh tersebut mulai dibangun sepanjang wilayah Mega Mendung, hingga wilayah Cipanas-Bogor. Setelah itu beberapa wilayah di Bogor juga diusahakan tanaman komersil lainnya yakni tanaman karet. Tanaman karet di wilayah Bogor dikenalkan pada

dasawarsa 1860-an, tanaman ini mencapai puncaknya pada masa kebijakan tanam paksa (*culturstelsel*) era pemerintahan Gubernur Jendral Van den Bosch.

Dua jenis tanaman komersil yang diusahakan diwilayah Bogor tersebut, memiliki jenis dan karakteristik yang sangat berbeda antara yang satu dengan yang lain. Tanaman teh yang hidup di dataran tinggi, membutuhkan tingkat perawatan yang tidak sedikit baik dalam bentuk pendanaan dan pengawasan sumber daya manusia. Sementara itu disisi lain tanaman karet tidak terlalu menuntut pendanaan dan pengawasan sumber daya manusia sebesar tanaman teh. Selama hampir lebih dari dua abad, dua jenis tanaman komersil tersebut, hidup berdampingan dengan tanaman para penduduk Bogor, seperti: padi, palawija, buah-buahan, sayur-mayur dan lain sebagainya. Pada titik inilah kemudian bahasan ini dinilai sangat menarik oleh tim peneliti, karena diantara perkebunan dan petani memiliki motif yang berbeda dalam mengusahakan tanaman yang diproduksi. Disatu pihak perkebunan memproduksi dengan bersandarkan pada nilai-nilai *profit oriented*, sementara itu petani dipihak lain meneruskan tradisi mode produksi yang subsinten.

Pergesekan antara petani dan perkebunan seperti yang dijelaskan oleh tim penulis dalam awal pembahasan latar belakang dinilai oleh tim penulis sebagai sebuah keniscayaan, sementara itu pengrusakan atau gangguan keseimbangan ekosistem lingkungan merupakan beberapa hal yang secara inheren menyertainya. Penelitian ini menempatkan aspek periodeisasi pada tahun 1905 sampai dengan 1960. Tahun 1905 ditetapkan dengan pertimbangan pada tahun tersebut wilayah Bogor ditetapkan sebagai *Gemeente*, sebuah konsep tata pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Sementara

itu tahun 1960 menjadi akhir pembahasan dengan pertimbangan, bahwa pada tahun tersebut Indonesia memasuki sebuah sistem ekonomi sosial dan politik yang baru. Periode ini menandai kota-kota di Indonesia mulai mendapatkan kooptasi yang amat besar dari penguasa dengan mengatasnamakan pembangunan yang menghasilkan realitas yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

PEMBAHASAN

Landscape Geografis dan Situasi Ekonomi kota Bogor Awal Abad-20

Daerah Bogor yang memiliki kondisi geografis sebagai daerah pegunungan, memiliki tanah yang subur guna membangun mode produksi agraria (pertanian dan perkebunan). Bentuk geografis tersebut memberikan kesempatan bagi kota Bogor bertumpu pada tanah sebagai alat produksi, dan sudah barang tentu akan mempengaruhi pola berfikir, perilaku dan pandangan-pandangan tentang kehidupan masyarakat di daerah Bogor. Daerah Bogor atau juga dikenal dengan nama tanah Sunda (dahulunya kerajaan Pajajaran, kerajaan yang menganut ajaran agama Hindu) berdiri diatas daerah yang cukup luas, Secara geografis, Bogor merupakan salah satu wilayah dari tanah Priangan, sebagai tempat lahir dan berkembangnya kebudayaan Sunda.

Bogor terletak pada posisi secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106° 48' BT dan 6° 26' LS, kedudukan geografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara, merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata. Kota Bogor mempunyai rata-rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut. Kondisi iklim di Kota Bogor suhu rata-rata tiap bulan 26°

C dengan suhu terendah 21,8° C dengan suhu tertinggi 30,4° C. Kelembaban udara 70 %, Curah hujan rata-rata setiap tahun sekitar 3.500 – 4000 mm dengan curah hujan terbesar pada bulan Desember dan Januari (Ekadjati, 2009 : 12).

Harsojo mengatakan bahwa secara antropologi-budaya, bahwa yang disebut suku sunda adalah orang-orang yang secara turun-temurun menggunakan bahasa-ibu, bahasa sunda serta dialeknya dalam kehidupan sehari-hari dan berasal serta bertempat tinggal di daerah Jawa Barat, daerah yang juga sering disebut Tanah Pasundan atau Tatar Sunda (Harsojo, dalam manusia dan kebudayaan di Indonesia, 2004 : 307). Tanah yang subur dengan perpaduan dataran rendah serta daerah pegunungan, memberikan konsekuensi berupa kelimpahan atas hasil bumi yang besar menjadi identitas bagi daerah Bogor. Hal inilah yang membuat penguasa kolonial Belanda saat itu, membangun jalan Daendels untuk menghubungkan daerah Bogor dengan daerah Priangan dan daerah pesisir pantai.

Kenyataan sebagai wilayah yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang cukup tinggi, tidak lain karena didukung kondisi geografis yang dikelilingi dataran tinggi dalam bentuk bukit dan pegunungan, serta banyaknya aliran air dalam bentuk mata air dan sungai, menjadi modal utama untuk menjalankan roda perekonomiannya, dalam bentuk : berladang, beternak serta aktivitas ekonominya. Eka Djati menuliskan dalam bukunya Kebudayaan Sunda, lebih dari 3 buah gunung terdapat di wilayah Bogor Jawa Barat, dan disela-sela kaki gunung dan bukit mengalir sungai- sungai yang airnya jernih (2009 : 18-19). Kekayaan alam yang melimpah diseluruh hamparan wilayah Bogor membuat setiap warganya dapat melaksanakan aktivitas ekonomi diwilayahnya masing-masing.

Aktivitas ekonomi yang bertumpu pada tanah ini yang kemudian memberikan sistem produksi masyarakat

Bogor menggunakan cara bekerja sama dalam mengelola produksi ekonominya. Tata cara pengelolaan ekonomi inilah yang kemudian menempatkan tanah sebagai alat produksi dengan model kepemilikan secara perseorangan, namun dalam penggarapannya menjadi tanggung jawab bersama yang menempati dan menggunakan tanah tersebut untuk tempat tinggal atau berproduksi. Tanah termasuk hutan disekitarnya, dianggap oleh mereka sebagai barang titipan kepada mereka dari yang lebih kuasa (Raja/ Yang Maha Kuasa) dan mereka bertugas untuk memeliharanya dan menjaga kelestariannya serta memanfaatkannya sebatas untuk memnuhi kebutuhan hidup mereka (Ekadjati, 2009 : 79).

Kepemilikan atas tanah di daerah Jawa Barat, didasarkan atas pengelolaan tanah yang sudah dilakukan sejak masa sebelum VOC masuk. Dengan seperti itu pemilikan atas tanah di Jawa Barat didasarkan atas pengelolaan dan pemilikannya yang bersifat turun temurun kepada generasi berikutnya (kepemilikan secara pribadi) disebut *Balong*. Hal tersebut dapat dilihat melalui laporan survey berjudul *Eindresume van het Onderzoek naar de Rechten van den Inlander*. Survey yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda tahun 1869 di Jawa Barat ini membuktikan bahwa sebagian besar desa-desa disepanjang daerah Jawa bagian Barat tanah yang dimiliki perseorangan jauh lebih banyak dan luas dari pada tanah yang dimiliki secara komunal, berbeda dengan daerah di Jawa bagian tengah, keadaannya justru sebaliknya (Koentjaraningrat, 2004: 316).

Kepemilikan tanah dalam masyarakat Bogor, memberikan dampak berupa naiknya status sosial bagi sang pemilik tanah dalam stratifikasi sosial masyarakatnya. Penguasaan atas sumber produksi menjadi landasan munculnya kepemilikan pribadi sebagai konsep yang memberikan legalitas terhadap pengertian

kerja. Frederick Engels menterjemahkan kerja sebagai sumber kemakmuran, menyediakan materi, dan yang menciptakan manusia itu sendiri, dengan demikian keberadaan seseorang akan ditentukan oleh kerja serta aksesnya terhadap sumber-sumber produksi (Jones, 2004 : 232).

Berdasarkan penjelasan kepemilikan sumber produksi tersebut, maka terdapat satu pemahaman yang lazimnya terbangun bahwa, dalam masyarakat agraris, tanah merupakan sumber produksi dan kekayaan yang utama, dan karenanya pemilikannya membawa prestise yang tinggi; sebagai akibatnya maka klasifikasi penduduk desa yang tradisional didasarkan atas kepemilikan tanah (Kartodirdjo, 1993 : 56).

Gambaran tentang terdapat kelompok-kelompok yang memiliki penguasaan atas sumber produksi dan alat produksi ini yang sekiranya menjelaskan kepada kita tentang kemampuan untuk memproduksi ide-ide serta gagasan dan pemikiran mengenai konsepsi filosofis masyarakat tradisional. Dengan ini maka kita mendapat petunjuk tentang golongan sosial mana yang memiliki otoritas (berupa pengaruh dan kemampuan secara politis) terhadap seluruh lapisan sosial masyarakat Bogor.

Stratifikasi sosial dalam masyarakat tradisional Bogor yang juga termasuk dalam masyarakat Jawa Barat, terbentuk atas dasar nilai-nilai dan pengetahuan yang bersumber dari sistem nilai agama Hindu, yang berasal dari luar Nusantara sebagai sebuah konsekuensi dinamika sosial masyarakat Jawa Barat dengan kelompok masyarakat diluar Nusantara (India dan China). Hal ini dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di Jawa Barat seperti Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Hindu. Selain itu dalam hikayat atau sejarah masyarakat Jawa Barat juga dituliskan, kalau masyarakat

Jawa Barat juga mengadopsi nilai-nilai agama Islam, yang diwujudkan dengan berdirinya Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Sebuah pertanyaan yang muncul dihadapan kita ialah bagaimana nilai-nilai Hindu dan Islam dapat masuk kedalam masyarakat Jawa Barat. Sebagai sebuah kenyataan yang inheren nilai-nilai Hindu dan Islam nampak sebagai sebuah gejala yang benar-benar muncul dan berkembang pada masyarakat Jawa Barat.

Kehidupan sosio-cultural masyarakat Bogor, sebelum Hindu-Budha dan Islam masuk masyarakat Jawa Barat telah membentuk system nilai dan budayanya tersendiri, yang dikenal sebagai budaya *Wiwitan* (Sunda Kawitan). Sebagai suatu nilai-nilai dan pengetahuan baru bagi masyarakat Jawa Barat yaitu nilai-nilai Hindu-Budha dan Islam, tentunya akan menunjukkan berbagai macam bentuk respon masyarakat Bogor terhadap nilai-nilai Hindu dan Islam yang masuk dan berkembang.

Keberadaan kerajaan-kerajaan Hindu dan Islam di tanah Jawa Barat, merupakan bukti bahwa telah terjadi kontak sosial dan komunikasi antara masyarakat di Bogor dengan masyarakat dari luar Jawa Barat. Sebelum membahas segi prosedural bagaimana interaksi sosial yang terjadi pada masyarakat Jawa Barat, akan lebih baik jika kita mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Interaksi sosial itu sendiri. Selo Soemardjan (1990: 61) menjelaskan, yang dimaksud dengan interaksi sosial adalah syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial, dimana maksud dari aktivitas-aktivitas sosial tidak lain adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.

Lebih lanjut Selo Soemardjan menerangkan bahwa Interaksi sosial memerlukan beberapa syarat dalam

perwujudannya, yakni adanya kontak sosial dan adanya hubungan komunikasi. Kontak sosial dan hubungan komunikasi inilah yang menjadi isi dari konsep interaksi sosial dalam masyarakat Jawa Barat dengan dunia luar. Argumentasi dari N.J Krom dan J.L.A Brandes telah cukup meyakinkan bahwa bangsa India telah datang ke Nusantara antara lain ke Tatar Sunda. Selain itu H.J De Graf dan T.H.G Pigeaud juga telah menjelaskan bagaimana nilai-nilai Islam kemudian masuk dan menyusun ranah *super struktur* masyarakat Jawa Barat (Herlina dkk, 2003: 37).

Buku sejarah Tatar Sunda menjelaskan, bahwa Tatar Sunda adalah suatu daerah dipulau Jawa yang mendapat pengaruh India, pengaruh ini terwujudkan dalam agama Hindu dan Budha yang kemudian dalam prosesnya melebur menjadi tradisi dalam unsur kebudayaannya, serta masuk kedalam bidang politik (Herlina dkk, 2003: 46). Hal ini dibuktikan dengan keberadaan kerajaan yang bercorak Hindu seperti Kerajaan Tarumanagara, kerajaan Galuh, dan Kerajaan Sunda. Sementara itu masuknya Islam ke Tatar Sunda, tidak terlepas dari jalur pelayaran internasional, dimana pulau Jawa menjadi tempat perlintasan jalur pelayaran Internasional pada saat itu. Dalam konteks perkembangan Islam di Jawa Barat, dalam buku sejarah Tatar Sunda juga dijelaskan bahwa konon pemeluk agama Islam pertama kali adalah Bratalegawa yang tidak lain adalah putra kedua Prabu Guru Pangandiparamarta Jayadewabrata sang penguasa kerajaan Galuh. Akan tetapi sinyalemen yang menguatkan dan menjadi pertanda masuknya Islam kedalam wilayah Jawa Barat ialah ketika berdirinya Kesultanan Cirebon yang kemudian diikuti kesultanan Banten hingga masa kolonial Belanda.

Penjelasan tentang bukti-bukti masuknya nilai-nilai Hindu dan Islam ke daerah Tatar Sunda atau Bogor, sekiranya telah menegaskan bahwa nilai-nilai

Hindu dan Islam mengisi paradigma berfikir masyarakat Bogor. Sebagai sebuah masyarakat yang mengadopsi nilai-nilai Hindu, masyarakat Bogor juga menerapkan nilai-nilai tersebut dalam menyusun format sosial masyarakatnya. Salah satu contoh penerapan nilai-nilai Hindu pada masyarakat Bogor ialah dengan diterapkan konsep *kasta* dalam stratifikasi sosial masyarakatnya. Kemunculan konsep kasta dalam stratifikasi sosial masyarakat Bogor, memberikan gambaran kepada kita tentang dinamika sosial masyarakat yang mulai teratur dalam bentuk penyusunan lapisan-lapisan sosial di dalamnya.

Pada masa awal masuknya Hindu-Budha di Jawa Barat, terjadi penyesuaian dalam format sosial masyarakat Jawa Barat, stratifikasi terbagi kedalam kasta, di dalam kasta terbagi menjadi beberapa tingkatan kasta yakni *brahmana*, *ksatria*, *waisya* dan *sudra*. Kasta Brahmana dan Ksatria menjadi kasta elite dalam masyarakat Jawa Barat yang memegang legitimasi untuk menelurkan peraturan-peraturan duniawi, menjaga nilai-nilai nenek moyang (menjaga *kabuyutan*) dan menjalankan roda pemerintahan tradisional. Sementara kasta Waisya dan Sudra sebagai pengikut dari kasta Ksatria dan menjalankan peraturan-peraturan duniawi yang ditetapkan guna meraih Nirwana/Surgaloka di saat kematian nanti. Pada masa ini pemegang trah penjaga kabuyutan dan pemimpin kelompok masyarakat menjadi kelompok yang memegang otoritas kepemimpinan di dalam masyarakat Bogor.

Perluasan varian tanaman komoditi perdagangan sebagai konsekuensi permintaan pasar Internasional yang semakin berkembang dan berubah-ubah, memaksa Nusantara untuk tidak hanya menghasilkan rempah-rempah dan palawija. Beberapa tanaman komoditi seperti : Kopi, Teh, Kopra, Tebu, Tembakau dan Beras menjadi jenis-jenis tanaman yang sangat digemari dan menjadi primadona, bahkan hingga masa

akhir pemerintahan kolonial di Nusantara. Khususnya untuk wilayah Bogor, tanaman komoditi yang berkembang dan cukup menguntungkan untuk diusahakan ialah tanaman teh. Secara aspek geografis dan klimatologi, wilayah Bogor (Priangan) merupakan daerah yang cukup baik untuk dapat menanam dan mengembangkan tanaman komoditi teh. Tanaman teh pertama kali dibawa ke wilayah Bogor oleh Andreas Clyer seorang berkebangsaan Jerman, pada tahun 1648.

Awal pengusahaan tanaman teh oleh VOC, dilakukan setelah cukup lama tanaman teh diperkenalkan oleh Andreas Clyer, dimana pada tahun 1824 pemerintah kolonial menugaskan perwakilannya di Jepang untuk membawa bibit-bibit teh untuk ditanam dan diproduksi di Hindia-Belanda. Usaha tersebut dilakukan oleh pemerintah kolonial untuk menghilangkan ketergantungan terhadap komoditi perdagangan teh dari Jepang dan negeri-negeri lain yang menghasilkan teh.

Usaha penanaman teh oleh pemerintah kolonial di Jawa, khususnya di wilayah Bogor merupakan pertanda begesernya kebijakan ekonomi kolonial di Nusantara. Ekonomi produksi mengeser kebijakan ekonomi monopoli perdagangan, sementara itu di sisi lain untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah kolonial menyiapkan infrastruktur lainnya seperti: 1. Pendirian perusahaan yang fokus untuk mengelola industri perkebunan teh; 2. Menyiapkan bibit-bibit teh yang akan ditanam; 3. Menyiapkan sumber daya manusia (pekerja) untuk mengelola dan mengolah perkebunan teh. Meskipun sudah menunjuk dan mempersiapkan perusahaan yang akan mengelola industri teh di Jawa, akan tetapi penguasaan industri tersebut masih dikuasai (monopoli) oleh pemerintah kolonial, bukan oleh sektor swasta.

Persiapan lahan dan penyediaan sumber daya manusia untuk mengelola

dan mengolah perkebunan teh di Bogor merupakan satu hal yang cukup sulit untuk dipenuhi oleh pemerintah kolonial. Hal ini dapat terjadi karena jumlah penduduk (demografi) dan watak serta karakteristik masyarakat Priangan (Jawa Barat) yang sama sekali berbeda dengan daerah lainnya, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Masyarakat Jawa Barat, khususnya yang berada di wilayah Priangan (Bogor) merupakan bentuk masyarakat yang memiliki model mata pencaharian dengan berladang. Secara umum masyarakat yang menggunakan model sistem mata pencaharian dengan model berladang ini dapat dijumpai disekitar wilayah Priangan, dimana model mata pencaharian ini tidak memerlukan sumber daya manusia yang banyak dalam melakukan aktivitas produksinya, selain itu sistem mata pencaharian dengan berladang juga kerap berpindah-pindah, sesuai dengan tingkat kesuburan dan waktu tanam.

Sekilas secara umum telah dijelaskan dalam sub-pembahasan sebelumnya mengenai usaha penanaman tanaman teh di Bogor pada dekade abad ke-17 hingga abad ke-18. Persoalan utama ketika pemerintah kolonial mengusaha penanaman teh di Bogor, tidak lain adalah kendala mengenai ketersediaan sumber daya manusia, yang berkorelasi dengan lahan produktif yang tidak tergarap. Pemerintah kolonial sesungguhnya memiliki hasrat yang besar untuk melakukan usaha penanaman dan produksi teh di Jawa, akan tetapi dalam perjalanannya kerap kali menghadapi persoalan yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Dalam karangan ini akan dijelaskan beberapa persoalan yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia untuk penanaman teh di wilayah Priangan.

Setelah pemerintah kolonial mengambil upaya penanaman komoditi teh dari pihak swasta (dalam hal ini pihak swasta sering kali dikenal dengan

nama *Preanger Planters*), pemerintah kolonial bergerak cepat dengan menugaskan Jacobus Isidorus loudewijk Levian Jacobson, seorang ahli dan pakar penguji teh di *Nederlandsche Handel Maastchappij* (NHM), Jacobson, yang kemudian diangkat menjadi inspektur budi daya teh pada dinas pemerintahan kolonial. Kebijakan lain yang ditempuh oleh pemerintah kolonial dalam menyelenggarakan industri perkebunan teh, ialah dengan membuat keputusan berupa Resolusi 5 November 1834 No. 3, yang menetapkan mengenai mobilisasi dan pengerahan tenaga penduduk dalam mendukung industri perkebunan teh.

Berkaitan dengan sumber daya manusia sebagai pekerja pada perkebunan teh, pemerintah kolonial juga melakukan perekrutan tenaga kerja yang berasal dari China. Tenaga kerja yang berasal China direkrut oleh pemerintah kolonial sebagai tenaga ahli dalam proses pengolahan teh, mendampingi masyarakat pribumi yang dipekerjakan oleh pemerintah kolonial di perkebunan teh²¹. Para pekerja yang berasal dari Macau (China) tersebut direkrut oleh Jacobson, pada tanggal 1 Maret 1838 dari Batavia dengan tugas sebagai penangkar teh, dan diberikan gaji sebesar f.10.- sebulan, selain itu Jacobson juga membawa serta 7.000.000 bibit teh untuk dikembangkan diperkebunan teh yang ada di seluruh Jawa, salah satunya ialah perkebunan teh yang ada di Cipanas- Bogor.

Seiring dioperasikannya perkebunan-perkebunan teh di seluruh Jawa, termasuk di Cipanas-Bogor, sejatinya kualitas teh yang berasal dari tanah Priangan memiliki kualitas yang lebih baik dari teh yang berasal dari perkebunan di daerah Jawa lainnya. Seperti yang dinyatakan oleh Soegijanto Padmo (2004: 158), berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Jacobson di beberapa tempat, teh yang berasal dari perkebunan teh di daerah Priangan- Jawa Barat memiliki kualitas

teh yang lebih baik di bandingkan teh yang berasal dari teh di Wonosobo. Pengawasan yang ketat dan manajemen produksi yang baik menjadi salah satu faktor yang membuat kualitas teh yang berasal dari tanah Priangan lebih baik dari teh yang berasal dari perkebunan lainnya di Jawa. Penyediaan para petugas pengawas (*controleur*) yang berasal dari Eropa, ditambah dengan para pekerja yang berasal dari China, sebagai tenaga penangkar teha merupakan bagian dari strategi pemerintah kolonial yang utama dalam produksi teh di Priangan.

Selain itu juga ada faktor lain yakni keberadaan bibit teh terbaik yang sebelumnya di bawa oleh Jacobson, yang kemudian disebar di beberapa wilayah perkebunan yang ada di Jawa. Demi mendapatkan hasil yang terbaik bagi kualitas teh, pemerintah kolonial juga melakukan mobilisasi yang cukup besar pula dalam hal tenaga kerja (buruh) yang bekerja sebagai pemetik teh. Sebagai gambaran untuk melihat besarnya mobilisasi pekerja dalam produksi teh di daerah Priangan, sebagai berikut adalah data mengenai gambaran perkebunan teh di Jawa :

Areal perkebunan teh yang diusahakan oleh perkebunan teh sepanjang kurun waktu 1835-1840 adalah rata-rata seluas 500 bau, dengan 2.345.960 rumpun tanaman teh, dimana 707.460 untuk mengembangkan produksi teh hitam. Tiga pabrik pengolahan teh yang besar masing-masing memerlukan 200.000 rumpun pohon teh dan 17 pabrik pengolahan teh yang kecil dimana masing-masing bisa menampung sebanyak 100.000 rumpun tanaman teh. Kemudian teh kering yang dihasilkan oleh 20 pabrik pengolahan tersebut ditampung dalam empat gudang pengepakan. (Padmo, 2004: 161).

Berdasarkan penjelasan Soegijanto Padmo mengenai mapping industri perkebunan teh di Jawa, maka dapat ditafsirkan bahwa perkebunan teh yang

berada di Cipanas (Bogor) merupakan salah satu dari wilayah penanaman teh dan penagkaran teh yang berada di Jawa Barat, dibawah pabrik utama (20 pabrik utama) pengolahan yang berada di *afdeling* Sukabumi. Pengelolaan perkebunan yang dilakukan dengan ketat dan manajerial yang cukup baik, serta mobilisasi penduduk yang kemudian diberikan kompensasi gaji dalam pekerjaan memetik, pengolahan dan pengepakan teh, menjadikan secara ringkas perusahaan perkebunan teh yang dilakukan oleh pemerintah hingga masa akhir dekade abad ke-19.

Pada sisi lain perusahaan teh yang dilakukan oleh pemerintah kolonial secara baik ternyata tidak memberikan hasil yang positif di satu sisi yang lainnya. Kualitas teh yang diusahakan oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda ternyata masih sangat jauh dari yang diharapkan , jika dibandingkan dengan teh yang berasal dari dari India, China dan Jepang. Pasar internasional kurang mengakomodasi kualitas teh yang dihasilkan dari Hindia-Belanda, dan hal ini berdampak pada permintaan teh dari Hindia-Belanda dalam pasar internasional.

Kelesuan pasar internasional terhadap komoditi teh yang berasal dari Hindia-Belanda, berdampak pada produksi teh yang diusahakan oleh pemerintah. Pengeluaran (cost produksi) yang ditanggung oleh pemerintah kolonial bertambah besar, sementara itu daya jual komoditi teh dari Hindia-Belanda melemah. Secara singkat dapat digambarkan melalui data-data yang dirangkum oleh Soegijanto Padmo (2004: 163) sebagai berikut :

Item	1851	1852	1853
Produksi (pon)	205.325	149.645	171.803
Ongkos Produksi (f)	163.288.23	124.461.84	139.080.28
Nilai Jual (f)	142.221.23	105.927.40	147.414.43
Selisih Nilai	21.067.-	18.534.44	8.334.15

Sumber : dikutip oleh Soegijanto Padmo dari Van der Chijs, 1904: 377

Selisih yang cukup besar antara biaya produksi dengan nilai jual dari komoditi teh, pada akhirnya membuat pemerintah kolonial mengevaluasi produksi teh yang diusahakan oleh pemerintah kolonial. Pengusahaan tanaman komoditi teh yang dilakukan oleh pemerintah kolonial yang cenderung menurun dan menambah beban pengeluaran pemerintah, memaksa pemerintah untuk tidak lagi mengusahakan tanaman komoditi teh. Masa-masa ini menjadi masa-masa suram dari aktivitas penanaman dan perdagangan teh di Hindia-Belanda, pada masa ini pula memasuki masa-masa peralihan pengusahaan teh dari pemerintah kepada sektor swasta.

Penurunan produksi dan perdagangan komoditi teh yang terjadi dalam skala besar di pulau Jawa, menjadi pemantik bagi munculnya kebijakan ekonomi yang baru dalam usaha pembudidayaan komoditi teh di Hindia-Belanda. Secara makro produksi teh yang berlangsung dalam dekade 1850-an ini merupakan satu periode pengusahaan komoditi teh, yang dilakukan pada masa kebijakan ekonomi-politik tanam paksa (*Culturstelsel*).

Beralihnya haluan kebijakan ekonomi negeri induk yang semula dikuasai oleh kelompok konservatif, kemudian menuju kebijakan liberal, yang dikendalikan oleh golongan liberal merupakan satu situasi yang kelak juga mempengaruhi kebijakan ekonomi-politik di Hindia-Belanda. Kegagalan pemerintah kolonial dalam mengelola tanah jajahan dan rendahnya kemampuan daya saing ekonomi Kerajaan Belanda, dalam pasar internasional membuat angin politik beralih kepada golongan liberal. Pada tahun 1870-an merupakan satu era dimana berakhirnya kebijakan politik konservatif yang termanifestasi dalam bentuk kebijakan tanam paksa (*Culturstelsel*).

Kerugian yang tidak kunjung reda, yang diterima oleh pemerintah kolonial

akibat pengusahaan tanaman komoditi teh, sempat disiasati oleh pemerintah kolonial dengan mengizinkan para penduduk menanam kopi dipekarangan rumah para penduduk masing-masing. Kebijakan ini dilakukan guna menekan angka pengeluaran upah dan biaya hidup yang dibutuhkan oleh para penduduk di sepanjang wilayah lahan perkebunan teh di daerah Priangan, termasuk juga di daerah Cipanas-Bogor. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, pada akhirnya tidak dapat mengurangi beban kerugian pemerintah kolonial dalam penguasaan tanaman komoditi teh. Berdasarkan surat keputusan pemerintah kolonial No. 5 tanggal 1 Mei 1864, pemerintah kolonial mulai merubah status perkebunan teh yang dikuasai oleh pemerintah kolonial kepada pihak swasta.

Akuisisi status perkebunan ke arah swastanisasi ini menjadi satu periode tersendiri dari sejarah perkebunan di Indonesia. Perubahan ini diawali dengan kebijakan ekonomi pemerintah kolonial yang mengeluarkan UU Agraria (*Agrarische wet Staatblad*) tahun 1870, dimana undang-undang tersebut tidak hanya melepaskan separuh beban pemerintah kolonial dalam pembiayaan aktivitas ekonomi di Hindia-Belanda, akan tetapi di satu sisi juga memberikan ruang untuk mengakomodasi kepentingan kongsi dagang dari Barat untuk menanamkan modalnya di bidang perkebunan.

Masuknya modal-modal dari Barat ke dalam usaha perkebunan teh di Jawa Barat, khususnya di wilayah Cipanas-Bogor tidak hanya merubah status perkebunan semata, akan tetapi kelak juga akan merubah status tanah penduduk dan bentuk-bentuk hubungan sosial yang berlaku. Berikut terlebih dahulu akan dijabarkan mengenai proses swastanisasi perkebunan teh yang terjadi di seluruh wilayah Priangan, khususnya di wilayah Cipanas-Bogor, sebagai wilayah

perkebunan teh yang berada dalam naungan *afdeling* Sukabumi.

Sejatinya proses pengelolaan perkebunan teh yang bersandar pada usaha swasta pertama kali dilakukan di daerah Priangan Tengah, yakni sekitar wilayah Bandung. Para pemodal atau pengusaha dari Barat yang ingin terlibat dalam usaha perkebunan teh di wilayah Priangan mengajukan permohonan dan mengurus seluruh keperluan administrasi kepada Residen Priangan. Residen Priangan adalah perwakilan dari Gubernur Jendral di Batavia, yang diberikan mandat untuk mengelola dan memanagerial wilayah Priangan. Beberapa perusahaan yang kemudian masuk kedalam wilayah Priangan untuk terlibat dalam bisnis perkebunan teh, diantaranya yang cukup dikenal ialah :

1. Keluarga pengusaha Rudolph Albert Kerkhoven yang membuka perkebunan teh di Arjasari pada tahun 1869.
2. Karel Albert Rudolf Bosscha yang dikenal sebagai raja teh Priangan, ia tiba di Jawa pada tahun 1887.
3. Karel Frederick Holle, seorang pengusaha teh yang membuka perkebunan di wilayah kaki Gunung Cikuray.

Para pengusaha yang masuk kedalam wilayah Priangan tersebut, membuka usaha perkebunan teh atas seizin pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Mereka tidak hanya melakukan akuisis terhadap beberapa pabrik teh, akan tetapi juga melakukan penyewaan terhadap tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara (pemerintah kolonial) dan tanah-tanah yang dimiliki oleh penduduk (perseorangan). Kebutuhan akan tanah-tanah sewaan guna membangun industri perkebunan di wilayah Priangan semakin meningkat permintaannya. Seperti yang dilaporkan oleh Residen Priangan L. De Steurs dalam *Memories van Overgave* tahun 1921, bahwa jumlah perkebunan di seluruh wilayah Priangan cukup banyak dan masih akan terus bertambah.

Perkebunan teh Cipanas-Bogor yang berada dalam wilayah *afdeling* Sukabumi, merupakan tempat bernaungnya 474 perusahaan perkebunan, diantaranya adalah perkebunan teh, kina, dan karet. Selain itu juga terdapat beberapa perkebunan dengan komoditi seperti : coklat, kapuk, kelapa, lada dan kopi, dengan masa sewa guna tanah selama 20 tahun sampai 75 tahun²⁶. Masuknya modal kedalam seluruh wilayah Priangan, khususnya di wilayah Cipanas-Bogor (*afdeling* Sukabumi), membuat perubahan morfologi kota, tidak hanya perubahan ekologi dalam bentuk perubahan pemanfaatan tanah dari kebutuhan primer penduduk pribumi, menuju tanah yang diusahakan sebagai areal perkebunan.

Masuknya modal perkebunan menuntut adaptasi kebutuhan infrastruktur daerah, seperti keberadaan penunjang transportasi (jalan, kendaraan, alat angkut), saluran pengairan (irigasi), pemukiman penduduk, fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta beberapa fasilitas lainnya. Guna membangun seluruh keperluan infrastruktur tersebut, dibutuhkan lembaga pembiayaan yang ditugaskan tidak hanya dalam rangka membiayai industri perkebunan swasta, akan tetapi juga membiayai kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah. Khusus untuk keperluan modal bagi para pengusaha perkebunan, pemerintah kolonial mendirikan bank, yang bernama *Cultuur Banken*, lembaga pembiayaan yang khusus membantu para pengusaha perkebunan di Hindia-Belanda.

Periode mengenai swastanisasi perkebunan teh di wilayah Cipanas-Bogor mencapai puncaknya seiring dengan pembangunan jalur transportasi yang membentang dan menghubungkan antara daerah Cipanas-Bogor dengan Batavia, Sukabumi, dan wilayah Priangan Tengah seperti Cianjur, Tasikmalaya, dan Garut. Jalur transportasi tersebut dikenal dengan nama jalan Anyer-Priangan, selain itu

juga dibangun jalur Kereta Api Bogor-Bandung-Cicalengka-Cilacap.

Disepanjang jalan raya tersebut dibangun fasilitas-fasilitas umum seperti rumah/pemukiman penduduk, tangsi-tangsi militer, kantor pemerintahan, kantor swasta, rumah sakit, sarana pendidikan dan lain sebagainya, dimana sisa-sisa peninggalannya masih dapat dijumpai hingga saat ini.

Kehidupan Petani Bogor Masa Penjajahan Jepang

Pecahnya perang pasifik dan ekspansi militer oleh Imperium Jepang di hampir seluruh kawasan Asia Tenggara menandai keterlibatan Jepang dalam kancah Perang Dunia ke- II. Pada bulan Juli tahun 1942 kekuatan militer Jepang masuk ke wilayah Tarakan (Kalimantan), dan semakin memperluas wilayah penguasaannya ke pulau Jawa. Pasca perundingan di Kalijati (Subang) bulan Maret 1942, kemudian resmi penyerahan kekuasaan Belanda terhadap seluruh wilayah yang dikuasainya kepada pemerintahan militer Jepang di Indonesia (Leirissa dkk, 2012: 88). Sekiranya inilah gambaran singkat mengenai proses masuknya pemerintahan militer Jepang ke Indonesia (khususnya pulau Jawa).

Masuknya imperium Jepang ke tanah Jawa, khususnya di wilayah Jawa Barat, sejatinya mengubah hampir seluruh kebijakan yang pernah dilakukan dan dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal ini tidak lain karena didasari atas situasi yang mendorong, yakni masa- masa perang di wilayah Asia Pasifik. Situasi perang yang sedang berkecamuk dan terdorong oleh pemenuhan kebutuhan barang-barang untuk proses peperangan, membuat pemerintahan imperium Jepang, membuat desain kebijakan yang cukup berbeda dengan penjajah sebelumnya. Jika sebelumnya pemerintah kolonial membangun pondasi ekonomi yang dioerintasikan untuk menopang industri perkebunan sebagai *profit eriented*, maka

pada masa penguasaan imperium Jepang, pondasi ekonomi diletakkan dalam menopang kebutuhan perang. Hal ini yang akan memberikan perbedaan dalam wilayah teknis dan penerapan kebijakannya di lapangan (Leirissa dkk, 2012: 89).

Wilayah Bogor (Jawa Barat) sebagai wilayah yang cukup subur dalam membangun ekonomi pertanian (beras) merupakan wilayah yang dinilai memiliki potensi yang besar dalam memproduksi beras sebagai asupan makanan bagi tentara Jepang (Leirissa dkk, 2012: 90). Jepang memandang bahwa dalam usaha memenangkan perang di Asia Pasifik menghadapi sekutu, persediaan logistik perang harus didapatkan melalui penguasaan wilayah jajahan, hal ini didasari oleh situasi yang tidak aman di wilayah lautan akibat gangguan yang diberikan oleh pihak sekutu. Logistik pertempuran yang sangat dibutuhkan oleh pemerintahan Jepang, diantaranya selain Beras ialah, Kapas, Rami (untuk membuat karung goni) dan tanaman Jarak (Kurasawa, 1993: 28-36).

Berdasarkan klasifikasi utama jenis tanaman yang dibutuhkan oleh pemerintahan Imperium Jepang pada masa perang Asia Pasifik tersebut, maka sudah dapat dipastikan jenis-jenis tanaman yang menjadi komoditi utama industri perkebunan pada masa pemerintah Belanda bukan menjadi yang prioritas. Tanaman teh sebagai tanaman komoditi utama di wilayah Bogor (Cipanas) yang sebelumnya menjadi primadona dan komoditi ekspor dari Jawa Barat, pada masa pemerintahan imperium Jepang mengalami masa-masa suram. Operasionalisasi perkebunan teh di kota Bogor (Cipanas) berhenti sama sekali, karena memang ketiadaan modal dan distribusi hasil produksi sebelumnya.

Kebijakan ekonomi pemerintahan Jepang yang prioritas di wilayah Bogor ialah usaha produksi beras, tanaman jarak dan rami merupakan kebijakan yang paling fundamental dalam rangka

mengeksploitasi potensi ekonomi dari daerah Bogor. Hal ini tidak lain karena jenis-jenis tumbuhan tersebut (Padi, Jarak dan Rami) merupakan komoditi tanaman yang mampu ditanam dan dikelola diwilayah Bogor. Khususnya beras, petani di Bogor dikenakan kebijakan untuk menanam padi secara besar-besaran dan diwajibkan pula untuk menyeter hasil penanaman padi kepada pemerintah Jepang dengan kompensasi pembayaran yang sangat rendah.

Berikut ini merupakan data-data mengenai penyerahan wajib hasil penanaman beras yang dilakukan oleh para petani di Bogor kepada pemerintahan Jepang :

Permintaan dan Penyerahan Beras
April 1943-Maret 1944
Wilayah Jawa Barat

Karesidenan	Target (Ton)	Persentase terhadap hasil panen keseluruhan	Penyerahan (ton)	Rata-Rata Penyerahan
Banten	39.77	13,5	31.517	79,2
Jakarta	337.883	41,6	293.807	87,0
Bogor	86.143	15,2	69.472	80,6
Priangan	40.262	5,1	41.383	102,8
Cirebon	152.903	21,4	128.692	84,2
Total	656.968	20,7	564.871	86,0

Sumber : (Diolah dari Aiko Kurasawa, 1993: 83)

Permintaan dan Penyerahan Padi
April 1944-Maret 1945
Jawa Barat

Karesidenan	Target (ton)	Persentase Terhadap Hasil Panen Keseluruhan	Penyerahan (ton)	Rata-Rata Penyerahan
Banten	46.000	22,3	18.483	28,0
Jakarta	324.000	39,8	131.237	46,7
Bogor	100.000	17,6	50.872	50,6
Priangan	84.000	10,7	50.930	60,6
Cirebon	108.000	15,1	87.399	80,9
Total	682.000	21,5	358.627	52,6

Sumber : (Diolah dari Aiko Kurasawa, 1993: 84)

Penyerahan wajib tanaman padi milik para petani kepada pemerintahan imperium Jepang, dalam perkembangan dan perjalanannya telah memberikan dampak negatif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Bogor. Fenomena kekurangan asupan

bahan makanan, hingga kelaparan menjadi fenomena yang umumnya terjadi di pulau Jawa pada masa penguasaan pemerintahan imperium Jepang. Fenomena kekuarangan pangan hingga kelaparan tersebut, bukan hanya dipicu oleh upaya eksploitasi hasil produksi yang dilakukan oleh pemerintahan imperium Jepang semata. Perubahan orientasi tanaman komoditi, pengenalan bibit baru, hingga pengenalan teknik menanam tanaman yang cukup baru, membuat kelompok petani menghadapi perubahan dan ketidakpastian yang tidak menentu (Leirissa, 2012: 89).

Menghadapi situasi yang demikian (kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sandang dan pangan), kelompok petani pribumi di kota Bogor mensiasatinya dengan melakukan menyembunyikan hasil produksi beras mereka ditempat-tempat tersembunyi atau menjualnya dalam perdagangan gelap (penyelundupan). Prilaku menyembunyikan beras dan masuk dalam aktivitas penyelundupan beras merupakan siasat yang dihadapi oleh para petani dalam menghadapi tekanan struktural yang dilakukan oleh pemerintahan imperium Jepang. Prilaku tersebut juga tetap dilakukan oleh kelompok petani di Bogor, meskipun para petani sudah memahami dan mengetahui betapa beratnya hukumna yang akan diberikan oleh pemerintahan imperium Jepang, seandainya mereka tertangkap atau diketahui.

Untuk dapat menghasilkan produksi beras dalam jumlah yang besar, pemerintah Jepang juga mengeluarkan kebijakan lainnya yakni mengubah fungsi lahan yang dimiliki oleh para petani. Lahan-lahan perkebunan dan tempat-tempat penangkaran ikan tawar (balong) milik penduduk pribumi menjadi sasaran utama peralihan fungsi lahan ini. Kebijakan peralihan fungsi lahan ini, dilakukan untuk menopang pembukaan lahan pertanian di wilayah Bogor secara

besar-besaran oleh pemerintah Jepang (Zuhdi, 2017: 56).

Selain kebijakan maksimalisasi lahan dan pembukaan lahan pertanian secara besar-besaran di wilayah Bogor, pemerintah Jepang juga mengenalkan teknik menanam atau keterampilan dalam mengolah tanaman. Untuk dapat mendukung program pengenalan teknik keterampilan dalam mengolah tanaman, pemerintah Jepang pimpinan desa di wilayah Cipeyem (Bogor Utara) mendirikan kursus pertanian yang dipimpin oleh Sumitra dengan melibatkan sekitar 40 orang penduduk yang berprofesi sebagai petani produktif. Kursus-kursus praktik pengolahan tanaman dalam bidang pertanian ini, semakin sering dikalukan keberbagai daerah lain dalam kurun waktu setiap minggu. Wilayah-wilayah tersebut antara lain desa Nyangkowek, babakan pasir, cicurug gun dan lain sebagainya (Zuhdi, 2017: 57).

Dalam situasi yang demikian, konflik horizontal antara kelompok masyarakat akan semakin terbuka. Hal ini dapat terjadi karena pemerintah imperium Jepang, mengangkat pengawas ditingkat kampung dan desa berasal dari kelompok sipil, yang sama sekali memiliki rekam jejak yang bersih dari penguasa sebelumnya (pemerintah kolonial Belanda). Orang-orang yang diangkat sebagai pengawas oleh pemerintah imperium Jepang, pada umumnya memiliki kebencian atau ingatan yang buruk terhadap perilaku para pemimpin desa masa pemerintahan kolonial Belanda. Tidak jarang terjadi upaya balas dendam yang dilakukan oleh pengawas-pengawas baru bentukan pemerintah imperium Jepang, terhadap mantan penguasa atau pemimpin lokal bentukan kolonial Belanda.

Pada masa pemerintahan imperium Jepang kebijakan sosial dan politik yang diorientasikan untuk memenuhi kepentingan ekonomi atau kebutuhan logistik perang diwujudkan melalui

pembentukan lembaga *Kumiai* dan *Tonarigumi*. Badan atau lembaga ini digunakan sebagai wadah untuk mobilisasi sosial tenaga manusia dan mengumpulkan bahan-bahan kebutuhan pokok militer Jepang. Para petugas-petugas pribumi yang menjadi pemimpin dalam *Kumiai* dan *Tonarigumi* memiliki kewenangan yang cukup besar dalam memaksa penduduk untuk menyerahkan seluruh hasil atau persediaan bahan makanan pokok yang mereka miliki (Zuhdi, 2017: 50).

Pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia secara umum merupakan masa-masa penjajahan yang sangat berat bila dibandingkan dengan masa penguasaan bangsa asing lainnya (Belanda dan Inggris). Pada masa penjajahan Jepang ini, masyarakat tidak memiliki peluang lain dalam bidang ekonomi, khususnya alternatif lain dalam mendapatkan pemasukan ekonomi. Pemerintahan militer Jepang di Indonesia menguasai sumber-sumber ekonomi strategis, dan melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap upaya produksi dan distribusi hasil produksi. Dimana semua langkah tersebut diupayakan untuk membantu Jepang dalam memenangi perang di wilayah Asia Pasifik.

Jika sebelumnya pada masa pemerintahan kolonial Belanda, masyarakat pribumi dapat memiliki alternatif lain dalam mendapatkan pendapatan, seperti bekerja di sektor jasa, industri dan lain sebagainya, maka pada masa pemerintahan militer Jepang, masyarakat pribumi hanya diperbolehkan mengelola tanah yang dimiliki maupun yang diberikan tugas untuk dikelola dan diatur sesuai kepentingan pemerintahan militer Jepang. Maka bukanlah satu hal yang sangat mengherankan jika kemudian pada masa pemerintahan Jepang, cukup banyak aset-aset dalam bidang industri (perkebunan) di Indonesia, khususnya di wilayah Bogor yang terhenti pada masa pendudukan Jepang.

Perkebunan teh di wilayah puncak (Cipanas-Bogor) yang sebelumnya pada masa pemerintahan kolonial Belanda, merupakan lahan bagi para petani di Bogor untuk mendapatkan alternatif pemasukan tambahan, pada masa pendudukan Jepang tidak beroperasi sama sekali (Wawancara dengan Bapak Oni, 12 Juli 2017). Cukup banyak petani yang menurut Bapak Oni kehilangan sumber pemasukan tambahan maupun pokok, karena industri perkebunan yang tutup (tidak beroperasi) pada masa pendudukan Jepang di Bogor.

Tidak hanya perkebunan teh yang mengalami gulung tikar atau tutup tidak beroperasi, akan tetapi perkebunan lainnya yakni masih beroperasi seperti perkebunan karet di wilayah Bogor (saat ini menjadi perkebunan VIII PTPN Cimulang-Bogor), semula menjadi lahan pemasukan bagi para petani dengan menyadap karet, kemudian pada masa pendudukan Jepang menjadi tempat untuk bekerja bagipara petani namun tidak diberikan upah sama sekali oleh pemerintahan Jepang. Para petani yang berada atau tinggal di sekitar perkebunan karet Cimulang-Bogor, diberikan tugas untuk mengelola, menjaga dan beban target produksi, akan tetapi kemudian tidak diberikan kompensasi penghasilan (Wawancara dengan Bapak Oni, 12 Juli 2017).

Beban hidup bagi para petani di wilayah Cimulang tidak sebesar para petani yang bertempat tinggal di wilayah perkebunan teh Cipanas-Bogor, karena banyak para petani yang dianggap masih sehat dan produktif dipaksa untuk bekerja Romusha oleh pemerintah Jepang. Melalui Tonarigumi, pemerintah Jepang melakukan mobilisasi secara paksa kepada para petani di wilayah Cipanas-Bogor, untuk bekerja di wilayah Ciseeng-Bogor untuk mengumpulkan batuan kapur (bahan utama pembuat semen), yang kemudian digunakan oleh pemerintah Jepang sebagai bahan dasar membangun rumah, kantor, gudang dan

lain sebagainya (Wawancara dengan bapak Iman Sahpitra, 12 Juli 2017).

Keadaan yang cukup berat dalam bidang ekonomi yang dirasakan oleh para penduduk di Bogor, khususnya yang secara umum berprofesi sebagai petani dirasakan begitu berat. Bahkan penjajahan yang berlangsung selama kurang lebih 3, 5 tahun dirasakan seperti berlangsung selama berabad-abad (Wawancara dengan bapak Iman Sahpitra, 12 Juli 2017). Ketidakpastian dalam bidang ekonomi tersebut dirasakan pula oleh para petani di Bogor, hingga pada masa awal-awal kemerdekaan. Dimana pada masa tersebut, terjadi kekosongan penguasa dan munculnya kelompok-kelompok pengganggu stabilitas keamanan yang berorientasi untuk melakukan kejahatan (kriminalistas) sosial di wilayah Bogor.

Jatuh Bangun Bertahan dan Terpuruk Hingga Akhir Tahun 1960an (Tahap Finalisasi)

Pasca perundingan Konfrensi Meja Bundar dan kembalinya ibu kota dari Yogyakarta menuju kota Jakarta, menandai dimulainya era pemerintahan Republik Indonesia secara utuh di pulau Jawa. Penataan birokrasi, digerakkannya kembali ekonomi nasional (industri perkebunan dan pertanian rakyat), dan pembukaan dunia pendidikan nasional berorientasikan ekonomi kerakyatan merupakan slogan utama dan langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintahan Soekarno-Hatta. Kota Bogor merupakan kota yang menjalankan tiga langkah program pemerintahan Orde Lama tersebut, karena di kota Bogor terdapat sumber dan kekuatan ekonomi yang mencakup ketiga program pemerintahan Soekarno-Hatta.

Pemerintahan Soekarno-Hatta merespon keadaan ekonomi masyarakat Indonesia yang sedang lemah sejak perang kemerdekaan hingga tahun 1949, dengan mengeluarkan kebijakan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP). Melalui

mandat yang diberikan kepada Perdana Menteri M. Natsir, pemerintahan Republik Indonesia menilai bahwa langkah awal untuk membangkitkan kekuatan ekonomi Indonesia ialah dengan mengkonsolidasikan, dan mensupport para pengusaha pribumi (Al-Rahab, 2014: 12). Fokus utama dari Rencana Urgensi Perekonomian ini ialah menguatkan industri perkebunan dan pertanian rakyat yang berada di wilayah pedesaan, karena wilayah pedesaan menjadi lumbung melimpahnya sumber daya manusia pasca kebijakan rasionalisasi kekuatan militer nasional (banyak petani atau usia produktif yang tidak terserap menjadi prajurit kemudian menjadi tenaga tidak produktif di desa-desa).

Kebijakan RUP (Rencana Urgensi Perekonomian) pada perkembangannya menjadi kebijakan ekonomi Benteng, yang mana dioerintasikan untuk memberikan fasilitas dan prioritas bagi kelompok pengusaha pribumi dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Fasilitas dan prioritas yang dimaksud adalah kemudahan untuk mendapatkan kebutuhan kredit perbankan, kemudahan dalam mendapatkan sumber daya alam bagi produksi industrinya dan diberikan ruang untuk mempromosikan hasil produksinya (seperti dalam acara Jakarta Fair, saat ini lebih dikenal dengan nama Pekan Raya Jakarta).

Pada prakteknya dilapangan kebijakan Ekonomi Benteng yang dipadukan secara paralel dengan kebijakan *landreform* dalam sektor pertanian, menghadapi kendala yang cukup besar. Khususnya di wilayah Bogor perjalanan kebijakan (dalam sektor dana kredit ini) hanya dapat dinikmati oleh kelompok-kelompok penguasa lokal. Keluarga-keluarga dari para birokrasi lokal memiliki kemudahan dalam mengakses kredit yang diberikan oleh pemerintah. Keadaan ini tentu saja disatu sisi memberikan perbedaan atau diskriminasi terhadap kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Negara,

disisi lain memberikan kenyataan mengenai monopoli terhadap akses-akses yang diberikan oleh Negara kepada masyarakat.

Situasi semakin bertambah buruk manakala dalam perjalanan kebijakan Ekonomi Benteng, pemerintah Orde Lama gagal dalam menjalankan kebijakan *landreform*. Kebijakan *landreform* juga menghadapi kendala yang sama dengan kebijakan ekonomi Benteng, dimana distribusi tanah (hak kepemilikan dan pengelolaan) hanya sampai pada lingkaran penguasa lokal dan keluarga birokrasi lokal di Bogor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh H. ten Dam pada kurun waktu 1950 hingga 1954, menjelaskan bahwa jumlah masyarakat yang berada di wilayah Cibodas-Bogor mencapai 5000 orang dengan menggantungkan hidup kepada keberadaan tanah yang hanya seluas 800 ha (Hardjono, 1990: 8).

Lebih lanjut menurut H. ten Dam, sebagian besar kelompok masyarakat di kota Cibodas-Bogor sejatinya adalah kelompok buruh tani dan kelompok petani bebas (Lutfhi, 2011: 109-110). Dua kelompok ini memiliki kesamaan yakni sama-sama tidak memiliki hak kepemilikan terhadap alat produksi yang penting, yaitu tanah. Keberadaan para petani yang sejatinya tidak memiliki tanah, sejatinya sudah diperhitungkan oleh pemerintah, maka dari itu sektor industri perkebunan juga menjadi prioritas oleh pemerintah. Melalui kebijakan konsolidasi dan penguatan modal usaha, industri perkebunan di Bogor yang dikelola oleh pemerintah melalui PTPN X area kerja wilayah Bogor hingga Sukabumi menghidupkan kembali perkebunan teh dan karet.

Cukup banyak petani yang tidak mendapatkan kesempatan memiliki tanah dan bekerja kepada para petani yang memiliki tanah, masuk menjadi buruh tani di perusahaan perkebunan yang dikelola oleh pemerintah melalui PTPN X. melalui dibukanya kesempatan para

petani yang tidak memiliki tanah untuk bekerja di sector industry perkebunan di Bogor, pemerintah berharap para petani tersebut mendapatkan kesempatan untuk meraih pendapatan melalui industry perkebunan. Usaha produksi yang diraih melalui sektor industry perkebunandalam perjalanannya memberikan hasil produksi yang melimpah, akan tetapi menghadapi masalah yang cukup pelik dalam sektor distribusinya (eksport).

Memasuki pertengahan tahun 1950-an hingga awal tahun 1960-an, kekuatan Negara-negara di dunia terpecah, karena munculnya perang dingin. Indonesia yang cenderung berporos pada Uni Soviet dan China (pembetulan poros Jakarta, Peking dan Moskow) menghadapi kendala dalam sektor distribusi hasil produksi teh dan karet. Komoditi teh Indonesia menghadapi saingan teh yang berasal dari China, sementara itu karet yang umumnya menjadi bahan dasar utama yang dibutuhkan oleh Negara-negara barat, mengalami kebuntuan karena hubungan Indonesia yang semain buruk dengan Negara-negara barat. Nilai produksi yang besar, tanpa dibarengi dengan pembukaan pasar produksi memberikan konsekuensi berupa macetnya ekonomi industri sektor perkebunan.

Situasi yang tidak kalah pelik juga terjadi pada para petani yang memiliki tanah untuk dikelola, dimana pada usaha untuk mengembangkan ekonomi pertanian tanaman padi juga menghadapi kebuntuan. Presiden Soekarno melalui lembaga-lembaga yang ditunjuk yakni Lembaga Penelitian Benih di Bogor dan Departemen Pertanian dan Urusan Agraria, menciptakan benih atau bibit unggul bagi tanaman padi. Pada perkembangannya memang dihasilkan sejumlah bibit-bibit unggul (Benih Unggul Nasional- Ungnas) yang cukup terkenal dan digunakan hingga masa pemerintahan Orde Baru (Lutfi, 2011: 61). Persoalan akses kembali menjadi permasalahan, karena bibit tanaman padi

(Ungnas) hanya dapat diakses oleh para petani yang memiliki jaringan ditingkat birokrasi. Masih cukup banyak petani yang tidak mampu untuk mendapatkan kesempatan menggunakan bibit (Ungnas) tersebut, untuk menjalankan ekonomi pertanian mereka di Bogor.

Situasi dalam sektor pertanian rakyat di Bogor pada masa pemerintahan Orde Lama ini, pada perkembangannya menghasilkan ketimpangan dan diskriminasi antara para petani di Bogor. Persoalan tersebut pada akhirnya memberikan konsekuensi bagi terganggunya produksi pertanian (beras) yang sejatinya hendak digalakkan oleh pemerintahan Orde Lama. Secara umum mengenai produksi beras pada masa pemerintahan Orde Lama, menurut Leon Mears dan Sidik Moeljono (dalam Anne Both dan Peter McCawley, 1982: 33) menjelaskan bahwa produksi beras di Jawa dari tahun 1954 sampai 1965 hanya mengalami kenaikan sebesar 2 %, (kenaikan tersebut sejatinya ditopang oleh sumbangan dari luar pulau Jawa), sementara itu pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 2% setiap tahun.

Data yang diberikan oleh Leon Mears dan Sidik Moeljono, meskipun menjelaskan secara umum produksi beras di Jawa, akan tetapi jika dipadankan dengan hasil riset H. ten Dam (jumlah penduduk dan luas tanah produktif), dapat menjelaskan betapa kepada kita bahwa masyarakat di Bogor pada masa pemerintahan Orde Lama menghadapi krisis pangan sepanjang periode 1950-an hingga tahun 1960-an. Hal ini tentu saja menambah situasi yang pelik dalam sektor kehidupan ekonomi masyarakat di Bogor, dimana disatu sisi harus bertahan hidup, akan tetapi disisi lain persoalan sosial dan ekonomi semakin menghimpit.

Situasi sosial dan ekonomi (diskriminatif dan lemahnya daya beli) yang cukup berat pada masa pemerintahan Orde Lama, memaksa para petani di wilayah Bogor untuk semakin

kreatif dalam menghadapi kesulitan hidup. Pada perkembangannya cukup banyak para petani di wilayah Bogor yang kemudian menggantungkan hidupnya dari sektor non-pertanian. Sektor non-pertanian seperti jasa, perdagangan dan pertukangan menjadi profesi yang banyak diijaki oleh penduduk di kota Bogor. Ketidakmampuan sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja petani di wilayah Bogor, sejatinya bukanlah kesempatan yang baik dalam memperoleh kepastian jaminan hidup, karena semakin banyaknya para petani yang masuk kedalam sektor tersebut, maka hasil yang didapat setiip orang akan semakin kecil (Hardjono, 1990: 17).

Sektor pertanian di wilayah Bogor yang menghadapi masa-masa kurang baik pada medio awal 1960-an, direspon oleh kelompok petani dengan masuk kedalam sektor perdagangan, industri, transportasi dan jasa pedesaan. Situasi ini tidaklah menjadi satu kesempatan yang mudah bagi para petani, karena dalam sektor-sektor tersebut persaingan juga sudah terjadi dan untuk masuk kedalam sektor-sektor tersebut juga memerlukan syarat yang tidak mudah.

Perdagangan merupakan sektor yang sejatinya tetap hidup meskipun diterpa oleh berbagai persoalan seperti : biaya yang tinggi dalam produksi, rendahnya daya beli produk dan lainnya. Akan tetapi untuk masuk dalam sektor perdagangan, para petani harus memiliki modal awal untuk dapat menjalankan usaha perdagangannya. Meskipun berdagang dalam konteks berjualan makanan kecil, modal menjadi syarat utama bagi para pelaku usaha mikro tersebut. Bapak Misran seorang penjual Laksa (kuliner) dikota Bogor, menjelaskan bahwa ayahnya yang sebelumnya menjual makanan Laksa, harus mendapatkan modal melalui pinjaman orang China di Bogor. Usaha kuliner laksa yang dijalankan oleh sang ayah, sejak masa awal pemerintahan Orde

Lama, dilakukan karena sang ayah tidak memiliki kesempatan untuk masuk dalam sektor pertanian dan industry perkebunan (Wawancara dengan bapak Misran, 12 Juli 2017).

Sementara itu untuk memasuki sektor transportasi dan pemerintahan di kota Bogor, para petani diharuskan memiliki keterampilan, karena pada masa Orde Lama dunia transportasi memasuki masa-masa modern. Delman dan becak perlahan sudah mulai bersaing dengan kehadiran kendaraan bermesin. Sementara itu untuk dapat menarik becak (umumnya penarik becak di tahun 1960-an dikota Bogor dapat dijumpai disekitar Pasar Anyar), para petani harus memiliki koneksi yang baik dengan para “juragan” becak, yang umumnya berasal dari etnis Tionghoa (wawancara dengan Bapak Dadang, 11 Agustus 2017; Tundjung, 2017: 4-5). Sektor pemerintahan, memang membuka peluang bagi setiap orang untuk masuk, akan tetapi sektor pemerintahan mengharuskan setiap orang yang masuk memiliki kemampuan pendidikan, dan syarat ini cukup sulit untuk dipenuhi oleh para petani di Bogor yang umumnya belum memiliki kesempatan mendapatkan pendidikan.

Respon kelompok petani di kota Bogor pada masa awal tahun 1960-an, dapat kita maknai sebagai upaya untuk mempertahankan hidupnya. Jaminan kepastian untuk bertahan hidup telah memaksa kelompok petani, untuk keluar dari sektor pertanian ke wilayah non-pertanian. Sektor non-pertanian juga bukan sektor yang dapat dengan mudah untuk dimasuki oleh kelompok petani di Bogor, akan tetapi menjadi sektor yang lebih rumit dan cukup kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Staatsblad 1905, no. 181, ANRI

Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Barat), 1978. ANRI.

Otonomi Daerah Hindia-Belanda. 1903-1940, 1998. ANRI

Jurnal

Sartono Kartodirdjo, *Politik Kolonial Belanda Abad-19*. (Yogyakarta: Lembaran Sejarah). 1972

Tundjung, Akhirnya Roda Berhenti Berputar : Becak di Jakarta 1930-1970. (Jakarta: Alur Sejarah). 2017

Buku-Buku

Al-Rahab, Amiruddin. 2014. **Ekonomi Berdikari Soekarno**. Komunitas Bambu. Jakarta.

Both, Anne dan Peter McCawley. 1982. **Ekonomi Orde Baru**. LP3ES. Jakarta.

Breman, Jan. 1986. **Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja di Jawa Masa Kolonial**. LP3ES. Jakarta

Cohen, Stuart. 1978. **Permulaan Budidaya Teh di Jawa, dalam Sejarah Perusahaan-Perusahaan Teh di Indonesia 1824-1924**. BPTK Gambung. Bandung.

Ekadjati. S. Edi, 2009. **Kebudayaan Sunda : suatu pendekatan sejarah**. Pustaka Jaya : Jakarta.

Hardjono, Joan. 1990. **Tanah Pekerjaan dan Nafkah : Di Pedesaan Jawa Barat**. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.

Herlina, Nina. dkk. 2003. **Sejarah Tatar Sunda**. Satya Historika. Bandung.

J.H Van Erden en W.B Deijs. 1946. **Thee Cultuurer Ondernemingen**, (s-Gravenhage: NV.Uitgeverij). ANRI

Jones, Pip. 2009. **Pengantar Teori-Teori Sosial**. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Kartodirdjo, Sartono. 1992. **Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah**. Gramedia. Jakarta.

Koentjaraningrat. 2004. **Manusia dan Kebudayaan di Indonesia** . Djambatan. Jakarta.

Kuntowijoyo. 2002. **Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris** . Mata Bangsa. Yogyakarta

. 2003. **Metodologi Sejarah**. Tiara Wacana. Yogyakarta.

Kurasawa, Aiko. 1993. **Mobilisasi dan Kontrol**. Grasindo. Jakarta.

Leirissa, R.Z. 2012. **Sejarah Perekonomian Indonesia**. Komunitas Bambu. Jakarta.

Lutfhi, N. Ahmad. 2011. **Melacak Sejarah Pemikiran Agraria**. Pustaka Ifada. Yogyakarta.

Margana, Sri dan Widya Fitria. 2010. **Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal dan Global, persembahkan 70 tahun Prof. Dr. Djoko Suryo**. Ombak. Yogyakarta

Padmo, Soegijanto. 2004. **Bunga Rampai Sejarah Sosial-ekonomi Indonesia**. Aditya Media. Yogyakarta

Pelzer, J. Karl. 1985. **Tuan Kebun dan Petani : Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863-1947**. Sinar Harapan. Jakarta.

Pranoto, Suhartono. 1991. **Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920**. Tiara Wacana. Yogyakarta.

Soemardjan, Selo. 2009. **Perubahan Sosial di Yogyakarta**. Komunitas Bambu. Jakarta.

Suganda, Her. 2014. **Kisah Para Preanger Planters**. Kompas. Jakarta.

Zuhdi, Susanto. 2017. **Bogor Zaman Jepang 1942-1945**. Komunitas Bambu. Jakarta.

Daftar Wawancara

Wawancara dengan Bapak Oni, 12 Juli 2017

Wawancara dengan bapak Iman Sahpitra, 12 Juli 2017

Wawancara dengan bapak Misran, 11 Agustus 2017

wawancara dengan Bapak Dadang, 11 Agustus 2017

Publikasi Elektronik

<http://fokus.news.viva.co.id> , diakses pada 02 Maret 2016

<http://lipsus.kompas.com>, diakses pada 10 Maret 2016

www.metrotvnews.com , diakses pada 07 Maret 2016

<http://www.phylopop.com> , diakses pada 09 Maret 2016